

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN FIFA DALAM MENYIKAPI KONFLIK RUSSIA-UKRAINE WAR DI SEPAK BOLA INTERNASIONAL

Anisa Adha Rizkia<sup>1\*</sup>, Deni Muhammad Kurniawan<sup>1</sup>, Haidan Agies Irsyad<sup>1</sup>, Hemalia Zahra<sup>1</sup>, Isna Siti Nursidah<sup>1</sup>, Jaliludin Muslim<sup>1</sup>  
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia<sup>1</sup>  
Email: anisaadharizkia@gmail.com \*

### Riwayat Artikel

Diterima: 09 Mei 2026

Disetujui: 09 Juni 2026

Diterbitkan: 23 Juni 2026

### Abstract

*The Russia–Ukraine conflict, which has re-escalated since February 2022, has had a broad impact on various sectors, including international sports. As the governing body of world football, FIFA faces a dilemma between upholding its principle of organizational neutrality and responding to international pressure to impose sanctions on Russia. This situation has given rise to debate regarding the legitimacy, effectiveness, and consistency of FIFA's policies in addressing global geopolitical conflicts. This study aims to analyze the implementation of FIFA's policies in response to the Russia–Ukraine conflict and assess their implementation based on George C. Edward III's theory of policy implementation. The study employed a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including documentation and a review of relevant literature. Data analysis was conducted using the Miles and Huberman interactive model, which includes data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that FIFA's policy implementation is influenced by four main dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Initially, FIFA presented a policy that tended to be ambiguous, but later adopted a firmer stance through the suspension of Russia. FIFA's formal authority served as a primary resource in policy implementation, while the organization's disposition demonstrated an adaptive attitude to international pressure. Furthermore, the bureaucratic structure and coordination with UEFA support effective policy implementation. This study concludes that FIFA's policy implementation reflects the complexity of decision-making within an international organization, which must balance the principles of neutrality, legitimacy, and policy effectiveness. Further research is recommended to examine the long-term impact of FIFA's policies on international sports governance and member states' perceptions of the principle of neutrality within global sports organizations.*

**Keywords:** FIFA Policy, Russia–Ukraine Conflict, Policy Implementation, International Organization, Global Governance.

### Abstrak

Konflik Rusia-Ukraina, yang kembali memanas sejak Februari 2022, telah berdampak luas pada berbagai sektor, termasuk olahraga internasional. Sebagai badan pengatur sepak bola

dunia, FIFA menghadapi dilema antara menjunjung tinggi prinsip netralitas organisasionalnya dan menanggapi tekanan internasional untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia. Situasi ini telah memunculkan perdebatan mengenai legitimasi, efektivitas, dan konsistensi kebijakan FIFA dalam menangani konflik geopolitik global. Studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan FIFA dalam menanggapi konflik Rusia-Ukraina dan menilai implementasinya berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data termasuk dokumentasi dan tinjauan literatur yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FIFA dipengaruhi oleh empat dimensi utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Awalnya, FIFA menyajikan kebijakan yang cenderung ambigu, tetapi kemudian mengadopsi sikap yang lebih tegas melalui penangguhan Rusia. Otoritas formal FIFA berfungsi sebagai sumber utama dalam implementasi kebijakan, sementara disposisi organisasi menunjukkan sikap adaptif terhadap tekanan internasional. Lebih lanjut, struktur birokrasi dan koordinasi dengan UEFA mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Studi ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan FIFA mencerminkan kompleksitas pengambilan keputusan dalam organisasi internasional, yang harus menyeimbangkan prinsip netralitas, legitimasi, dan efektivitas kebijakan. Penelitian lebih lanjut direkomendasikan untuk meneliti dampak jangka panjang kebijakan FIFA terhadap tata kelola olahraga internasional dan persepsi negara anggota tentang prinsip netralitas dalam organisasi olahraga global.

**Kata kunci:** Implementasi Kebijakan, Kebijakan FIFA, Konflik Rusia-Ukraina, Organisasi Internasional, Tata Kelola Global.

## A. PENDAHULUAN

Konflik Rusia-Ukraina yang kembali memanas sejak Februari 2022 telah memberikan dampak signifikan terhadap stabilitas global, tidak hanya dalam aspek politik dan keamanan internasional, tetapi juga pada sektor ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk olahraga. Sepak bola sebagai olahraga dengan pengaruh global yang besar tidak terlepas dari dinamika geopolitik tersebut. *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA) sebagai organisasi internasional yang mengatur sepak bola dunia dihadapkan pada tekanan global untuk merespons konflik yang melibatkan salah satu negara anggotanya, yaitu Rusia.

Menurut data *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) (2022), konflik ini telah menyebabkan lebih dari 8 juta pengungsi dari Ukraina ke berbagai negara di Eropa, serta jutaan lainnya menjadi pengungsi internal. Selain itu, berbagai organisasi internasional turut mengambil langkah-langkah pembatasan terhadap Rusia sebagai bentuk respons atas konflik tersebut. Dalam sektor olahraga, Komite Olimpiade Internasional (IOC) (2023) merekomendasikan pelarangan partisipasi atlet Rusia dalam kompetisi internasional. Menindaklanjuti hal tersebut, FIFA bersama Union of European Football Associations (UEFA) secara resmi menjatuhkan sanksi berupa larangan terhadap tim nasional dan klub Rusia untuk berpartisipasi dalam seluruh kompetisi internasional sejak Maret 2022 (UEFA, 2022).

Kebijakan FIFA tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi olahraga internasional. Di satu sisi, langkah tersebut dipandang sebagai bentuk solidaritas

global serta upaya menjaga nilai-nilai perdamaian dan sportivitas dalam olahraga. Namun di sisilain, kebijakan ini memunculkan kritik terkait prinsip netralitas organisasi olahraga internasional, mengingat FIFA dalam statuta resminya menegaskan bahwa organisasi ini bersifat independen dan tidak terlibat dalam politik (FIFA, 2009). Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip netralitas organisasi dan realitas tekanan politik global, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batasan peran organisasi internasional dalam merespons konflik geopolitik.

Dalam administrasi publik dan organisasi internasional, kebijakan FIFA tersebut mencerminkan proses pengambilan keputusan yang kompleks, yang melibatkan berbagai aktor dan kepentingan lintas negara. Proses ini tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif organisasi, tetapi juga oleh tekanan politik, legitimasi global, serta dinamika kekuasaan antarnegara (Follert et al., 2020). Implementasi kebijakan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk asosiasi sepak bola nasional, konfederasi regional, sponsor, dan lembaga internasional lainnya, sehingga menunjukkan karakteristik tata kelola global (*global governance*) yang bersifat multi-aktor.

Berdasarkan uraian tersebut, muncul pertanyaan penelitian mengenai bagaimana implementasi kebijakan FIFA dalam menyikapi konflik Rusia-Ukraina, serta sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip administrasi dan organisasi internasional, khususnya terkait netralitas, legitimasi, dan efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan FIFA dalam konteks konflik Rusia-Ukraina serta implikasinya terhadap tata kelola sepak bola internasional dan kredibilitas FIFA sebagai organisasi global.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi guna mencapai tujuan tertentu. Dalam administrasi publik, implementasi kebijakan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan teknis suatu keputusan, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan nyata oleh aktor pelaksana. Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Nugroho, 2022). Komunikasi berkaitan dengan kejelasan penyampaian kebijakan kepada pihak pelaksana agar tidak terjadi kesalahan interpretasi dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya mencakup kemampuan organisasi dalam menyediakan dukungan berupa kewenangan, informasi, staf, maupun fasilitas yang memadai. Disposisi berkaitan dengan komitmen, sikap, dan kesiapan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi menyangkut mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan prosedur organisasi dalam implementasi kebijakan (Suwintri, 2017). Dalam konteks organisasi internasional, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh tekanan politik global, legitimasi internasional, dan hubungan antaraktor lintas negara yang terlibat dalam proses pengambilan Keputusan (Taufiqurokhman, 2023). Dengan menggunakan 4 indikator yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan George C. Edward III digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai bagaimana FIFA mengimplementasikan kebijakan terhadap Rusia pasca terjadinya konflik Rusia-Ukraina dalam sepak bola internasional. Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana FIFA mengomunikasikan kebijakan sanksi kepada asosiasi sepak bola internasional, bagaimana sumber daya dan kewenangan organisasi digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, serta bagaimana koordinasi antara FIFA, UEFA, dan organisasi olahraga internasional lainnya dilakukan. Selain itu, teori ini juga digunakan untuk melihat bagaimana struktur birokrasi FIFA dan sikap organisasi terhadap tekanan politik global memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji sejauh mana kebijakan FIFA dapat dijalankan secara efektif di tengah tuntutan netralitas organisasi internasional dan tekanan geopolitik global (Mutohir, 2022). Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai kerangka analisis, penelitian tidak hanya berfokus pada bentuk sanksi yang diberikan FIFA kepada Rusia, tetapi juga pada proses tata kelola organisasi internasional yang memengaruhi pengambilan dan pelaksanaan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan George C. Edward III menjadi kerangka penting dalam menganalisis sejauh mana kebijakan FIFA mampu mencerminkan prinsip legitimasi, efektivitas, dan netralitas dalam tata kelola sepak bola internasional.



Gambar 1. Kerangka Implementasi kebijakan FIFA Dalam Menyikapi Konflik Russia-Ukraine War di Sepak Bola Internasional  
Sumber : Data diolah oleh peneliti (2026)

### C. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan FIFA dalam menyikapi konflik Russia-Ukraine War di sepak bola internasional, bukan untuk mengukur gejala dengan angka. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah makna, konteks, serta dinamika kebijakan yang muncul dari interaksi antara FIFA, UEFA, dan

lingkungan geopolitik global. Menurut Sugiyono (2014), penelitian kualitatif digunakan untuk memahami kondisi objek secara alamiah, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menafsirkan data. Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan angket sebagai teknik penggalian informasi yang saling melengkapi.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan secara berkelanjutan. Model ini dipilih karena data yang digunakan bersumber dari berbagai dokumen, kebijakan resmi, dan literatur akademik yang perlu dibaca secara mendalam agar menghasilkan pemahaman yang utuh. Ullah dan Septiadi (2023) menjelaskan bahwa analisis interaktif efektif digunakan ketika peneliti perlu menghubungkan berbagai sumber data primer dan sekunder dalam satu alur analisis yang sistematis. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi, sehingga hasil temuan dapat diperiksa silang dari berbagai sumber yang berbeda dan tidak bertumpu pada satu informasi saja.

Penelitian ini memiliki batasan yang jelas agar pembahasan tetap fokus dan terarah. Kajian difokuskan pada isu implementasi kebijakan FIFA dalam merespons konflik Russia-Ukraine War di sepak bola internasional. Selain itu, penelitian hanya menggunakan referensi yang terbit sejak tahun 2022 agar analisis tetap relevan dengan perkembangan terbaru. Batasan ini penting untuk menjaga konsistensi pembahasan dan menghindari perluasan topik ke luar fokus utama penelitian. Sejalan dengan pandangan Daud dalam Intan (2023), pembatasan penelitian diperlukan agar kajian tidak melebar dan tetap berada dalam ruang lingkup yang telah ditetapkan sejak awal.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsistensi Pesan Kebijakan kepada Asosiasi Sepak Bola Nasional, Konfederasi (UEFA), dan Klub**

Konsistensi pesan kebijakan merupakan salah satu indikator utama dalam dimensi komunikasi menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III, karena menentukan sejauh mana suatu keputusan dapat dipahami, diterima, dan dilaksanakan secara seragam oleh seluruh aktor pelaksana kebijakan. Dalam konteks implementasi kebijakan FIFA terhadap Rusia pasca konflik Rusia Ukraina, konsistensi komunikasi menjadi aspek yang sangat penting mengingat FIFA harus menyampaikan kebijakan kepada berbagai pemangku kepentingan, mulai dari asosiasi sepak bola nasional, konfederasi regional seperti UEFA, hingga klub-klub yang berpartisipasi dalam kompetisi internasional. Ketika pesan kebijakan tidak disampaikan secara konsisten, maka potensi terjadinya perbedaan interpretasi dan hambatan implementasi akan semakin besar (Nugroho, 2022).

Pada tahap awal konflik Rusia Ukraina, FIFA menyampaikan kebijakan yang relatif moderat dengan hanya membatasi penggunaan atribut nasional Rusia, seperti larangan penggunaan nama resmi negara, bendera, dan lagu kebangsaan dalam pertandingan internasional, tanpa secara langsung melarang partisipasi tim nasional maupun klub Rusia dalam kompetisi internasional (Reuters, 2022). Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa FIFA pada awalnya berupaya mempertahankan posisi netral sesuai prinsip dasar organisasi olahraga internasional yang menempatkan sepak bola di luar kepentingan politik global. Namun, pesan

kebijakan ini menimbulkan ambiguitas karena tidak memberikan kepastian yang tegas mengenai arah kebijakan organisasi terhadap Rusia di tengah meningkatnya tekanan internasional. Kondisi tersebut memunculkan berbagai interpretasi dari asosiasi anggota terkait posisi resmi FIFA dalam menyikapi konflik tersebut (Suwintri, 2017).

Ketidakkonsistenan pesan kebijakan terlihat ketika sejumlah asosiasi sepak bola nasional, khususnya dari kawasan Eropa seperti Polandia, Swedia, dan Republik Ceko, secara terbuka menyatakan penolakan untuk bertanding melawan Rusia meskipun FIFA belum mengeluarkan keputusan larangan penuh (Axios, 2022). Sikap federasi-federasi tersebut menunjukkan bahwa pesan awal FIFA dianggap belum cukup tegas untuk menjawab tuntutan moral dan politik yang berkembang di lingkungan sepak bola internasional. Di sisi lain, UEFA juga mengambil langkah yang lebih progresif dengan mendukung pembatasan lebih ketat terhadap Rusia, sehingga menciptakan perbedaan intensitas komunikasi kebijakan antara FIFA sebagai regulator global dan UEFA sebagai konfederasi regional.

Tekanan dari berbagai asosiasi anggota, opini publik internasional, sponsor, serta koordinasi dengan UEFA kemudian mendorong FIFA melakukan perubahan kebijakan secara signifikan melalui keputusan suspensi penuh terhadap tim nasional dan klub Rusia dari seluruh kompetisi internasional. Perubahan ini menandai adanya penyesuaian arah komunikasi organisasi dari pendekatan moderat menuju komunikasi yang lebih tegas dan seragam. Setelah keputusan tersebut diumumkan secara resmi, tidak lagi terdapat perbedaan interpretasi yang signifikan di kalangan asosiasi anggota mengenai posisi FIFA terhadap Rusia. Hal ini menunjukkan bahwa konsistensi pesan kebijakan akhirnya berhasil dibangun setelah organisasi mengambil keputusan final yang jelas.

Konsistensi komunikasi yang terbangun pada tahap akhir implementasi berkontribusi besar terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kejelasan pesan memungkinkan seluruh asosiasi sepak bola nasional, konfederasi regional, dan klub-klub terkait memahami arah kebijakan yang harus dilaksanakan tanpa menimbulkan kebingungan administratif. Selain itu, konsistensi tersebut juga memperkuat legitimasi keputusan FIFA di mata komunitas sepak bola internasional karena organisasi dinilai mampu memberikan kepastian sikap terhadap situasi krisis global.

Berdasarkan analisis ini, indikator konsistensi pesan kebijakan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan FIFA terhadap Rusia mengalami dinamika komunikasi yang cukup kompleks. Pada fase awal, ketidakkonsistenan pesan sempat menghambat efektivitas implementasi karena memunculkan ambiguitas dan perbedaan respons di kalangan pemangku kepentingan. Namun, pada fase selanjutnya, FIFA berhasil memperkuat konsistensi komunikasi melalui keputusan suspensi penuh yang disampaikan secara tegas dan terkoordinasi. Temuan ini menegaskan bahwa dalam organisasi internasional, konsistensi pesan kebijakan merupakan elemen strategis yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, terutama ketika organisasi dihadapkan pada tekanan geopolitik global yang menuntut kepastian sikap (Taufiqurokhman, 2024).

### **Kewenangan Formal FIFA dalam Menetapkan dan Menegakkan Sanksi terhadap Rusia**

Dalam konteks implementasi kebijakan, sumber daya tidak hanya dipahami sebagai ketersediaan personel atau dukungan administratif, tetapi juga mencakup otoritas hukum yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan secara efektif.

Dalam kasus kebijakan FIFA terhadap Rusia pasca konflik Rusia Ukraina, kewenangan formal menjadi faktor utama yang menentukan kemampuan organisasi dalam mengambil keputusan strategis serta memastikan bahwa keputusan tersebut dapat diterapkan secara sah di seluruh lingkungan sepak bola internasional (Hanifati, 2023).

Sebagai organisasi internasional yang mengatur tata kelola sepak bola dunia, FIFA memiliki kewenangan formal yang diatur dalam statuta organisasi untuk mengatur keanggotaan, partisipasi kompetisi internasional, serta menjatuhkan sanksi administratif kepada asosiasi anggota yang dianggap melanggar prinsip dan ketentuan organisasi (Pandjaitan, 2011). Kewenangan ini memberikan legitimasi kelembagaan bagi FIFA untuk mengambil keputusan terhadap Rusia dalam bentuk pembatasan maupun larangan partisipasi dalam kompetisi internasional. Dalam implementasi kebijakan terhadap Rusia, kewenangan tersebut menjadi dasar hukum utama yang memungkinkan FIFA mengambil tindakan tanpa harus menunggu intervensi dari otoritas politik internasional lainnya.

Penerapan kewenangan formal ini terlihat ketika FIFA secara resmi mengeluarkan keputusan suspensi terhadap tim nasional dan klub Rusia dari seluruh kompetisi internasional. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa organisasi memiliki kapasitas regulatif untuk menegakkan kebijakan secara langsung terhadap asosiasi anggotanya. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kemampuan organisasi untuk mengeluarkan keputusan yang mengikat secara administratif merupakan bentuk konkret dari efektivitas sumber daya kelembagaan (Cahyono, 2026). Hal ini menunjukkan bahwa FIFA tidak hanya berfungsi sebagai regulator teknis kompetisi, tetapi juga sebagai institusi global yang memiliki otoritas untuk mengatur perilaku anggota dalam situasi krisis internasional.

Selain kewenangan internal, efektivitas sumber daya FIFA juga diperkuat melalui koordinasi kelembagaan dengan UEFA sebagai konfederasi regional sepak bola Eropa (Wibowo, 2025). Keselarasan keputusan antara FIFA dan UEFA memperkuat legitimasi implementasi kebijakan karena menciptakan kesatuan arah dalam penerapan sanksi terhadap Rusia. Koordinasi ini penting karena tanpa dukungan konfederasi regional, implementasi kebijakan berpotensi menghadapi hambatan administratif maupun resistensi dari asosiasi anggota tertentu. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan, penegakan sanksi dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur di tingkat internasional maupun regional.

Namun demikian, meskipun FIFA memiliki kewenangan formal yang kuat, implementasi kebijakan terhadap Rusia juga menunjukkan bahwa penggunaan otoritas kelembagaan tidak sepenuhnya terlepas dari tekanan eksternal. Keputusan organisasi dipengaruhi oleh desakan federasi anggota, opini publik internasional, sponsor, serta dinamika politik global yang berkembang seiring eskalasi konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam organisasi internasional, kewenangan formal memang menjadi fondasi utama implementasi kebijakan, tetapi efektivitas penggunaannya sangat dipengaruhi oleh legitimasi politik dan dukungan lingkungan eksternal.

Berdasarkan analisis indikator ini, kewenangan formal FIFA terbukti menjadi sumber daya yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan terhadap Rusia. Otoritas hukum yang dimiliki organisasi memungkinkan kebijakan dapat diterapkan secara sah dan mengikat, sementara koordinasi kelembagaan memperkuat efektivitas pelaksanaannya. Temuan ini menegaskan bahwa dalam implementasi kebijakan organisasi internasional, sumber daya

kelembagaan berupa kewenangan formal merupakan instrumen strategis yang memungkinkan organisasi merespons dinamika global secara cepat dan terstruktur.

### **Komitmen dan Sikap FIFA dalam Merespons Tekanan Internasional terkait Konflik Rusia Ukraina**

Dalam implementasi kebijakan organisasi internasional, keberhasilan suatu keputusan sangat dipengaruhi oleh sikap dan orientasi lembaga pelaksana dalam merespons dinamika yang berkembang (Wibowo, 2025). Pada kasus kebijakan FIFA terhadap Rusia pasca konflik Rusia Ukraina, dimensi disposisi menjadi penting untuk dianalisis karena berkaitan langsung dengan bagaimana organisasi menentukan komitmen kelembagaannya di tengah tekanan global yang menuntut tindakan tegas. Analisis terhadap dimensi ini berfokus pada konsistensi sikap FIFA dalam menyeimbangkan prinsip netralitas organisasi olahraga internasional dengan tuntutan legitimasi moral dari komunitas sepak bola internasional.

Sebagai organisasi internasional yang secara normatif menempatkan diri sebagai institusi non-politik, FIFA selama ini menegaskan komitmennya terhadap prinsip netralitas dalam tata kelola sepak bola internasional sebagaimana tertuang dalam statuta organisasi. Prinsip ini mengharuskan FIFA menjaga independensi organisasi dari intervensi politik serta memastikan bahwa sepak bola tidak dijadikan instrumen kepentingan geopolitik (ZIZI, 2025). Dalam konteks konflik Rusia–Ukraina, prinsip tersebut menjadi tantangan tersendiri karena organisasi dihadapkan pada tekanan global yang sangat besar untuk mengambil posisi yang jelas terhadap tindakan Rusia.

Pada tahap awal implementasi kebijakan, disposisi FIFA menunjukkan kecenderungan hati-hati dan moderat. Hal ini terlihat dari keputusan awal organisasi yang hanya membatasi penggunaan atribut nasional Rusia tanpa secara langsung melarang partisipasi tim nasional maupun klub Rusia dalam kompetisi internasional. Sikap tersebut mencerminkan upaya FIFA untuk tetap menjaga keseimbangan antara komitmen terhadap netralitas organisasi dan kebutuhan merespons situasi internasional. Namun, keputusan ini justru menimbulkan kritik dari berbagai asosiasi sepak bola nasional yang menilai bahwa FIFA belum menunjukkan komitmen yang cukup kuat dalam menyikapi krisis tersebut.

Seiring meningkatnya tekanan dari federasi anggota, UEFA, sponsor, serta opini publik internasional, disposisi organisasi mengalami perubahan yang cukup signifikan. FIFA kemudian mengambil langkah lebih tegas melalui keputusan suspensi penuh terhadap tim nasional dan klub Rusia dari seluruh kompetisi internasional. Perubahan sikap ini menunjukkan adanya disposisi yang adaptif terhadap perkembangan situasi global. Dalam perspektif implementasi kebijakan, kemampuan organisasi untuk menyesuaikan orientasi kebijakannya terhadap dinamika eksternal dapat dipandang sebagai bentuk fleksibilitas kelembagaan yang mendukung efektivitas implementasi.

Namun demikian, perubahan disposisi tersebut juga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi komitmen FIFA terhadap prinsip netralitas. Pergeseran sikap yang relatif cepat menimbulkan persepsi bahwa keputusan organisasi tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan internal kelembagaan, melainkan dipengaruhi oleh tekanan politik dan moral dari lingkungan eksternal. Kondisi ini memperlihatkan bahwa disposisi dalam implementasi kebijakan organisasi internasional sering kali tidak berada dalam posisi yang sepenuhnya independen, melainkan dipengaruhi oleh konteks geopolitik yang berkembang.

Berdasarkan analisis indikator ini, disposisi FIFA dalam implementasi kebijakan terhadap Rusia menunjukkan karakter yang pragmatis dan adaptif. Organisasi pada akhirnya memilih menyesuaikan komitmennya terhadap tuntutan legitimasi global dibanding mempertahankan netralitas secara absolut. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan organisasi internasional, disposisi pelaksana kebijakan menjadi faktor strategis yang menentukan arah keputusan, terutama ketika organisasi dihadapkan pada tekanan eksternal yang menuntut respons cepat dan tegas.

### **Mekanisme Koordinasi dan Pengambilan Keputusan FIFA dalam Penerapan Sanksi terhadap Rusia**

Implementasi kebijakan dalam organisasi internasional tidak dapat dilepaskan dari bagaimana struktur kelembagaan mengatur proses koordinasi dan pengambilan keputusan. Dalam konteks kebijakan FIFA terhadap Rusia pasca konflik Rusia Ukraina, dimensi struktur birokrasi menjadi penting karena berkaitan dengan efektivitas mekanisme internal organisasi dalam merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan keputusan strategis di tengah tekanan geopolitik global. Analisis terhadap dimensi ini difokuskan pada bagaimana struktur birokrasi FIFA mampu memfasilitasi koordinasi kelembagaan serta memastikan kebijakan dapat diterapkan secara terorganisasi kepada seluruh asosiasi anggota (Tjenreng et al., 2019).

FIFA sebagai organisasi pengatur sepak bola internasional memiliki struktur birokrasi yang terpusat dengan pembagian kewenangan yang jelas dalam proses pengambilan keputusan (Radhiansyah et al., 2023). Struktur ini memungkinkan keputusan strategis, termasuk penetapan sanksi terhadap asosiasi anggota, dapat diproses melalui jalur administratif yang terkoordinasi. Keberadaan otoritas eksekutif dalam organisasi memberikan kemampuan bagi FIFA untuk merespons situasi darurat secara cepat melalui keputusan yang memiliki kekuatan administratif mengikat.

Dalam implementasi kebijakan terhadap Rusia, efektivitas struktur birokrasi terlihat dari kemampuan organisasi dalam mengonsolidasikan keputusan dengan berbagai aktor internal maupun eksternal, khususnya UEFA sebagai konfederasi regional. Koordinasi ini menjadi elemen penting karena keputusan yang diambil FIFA memerlukan dukungan kelembagaan agar dapat dijalankan secara seragam di tingkat global dan regional. Keselarasan keputusan antara FIFA dan UEFA menunjukkan bahwa struktur birokrasi organisasi mampu menjalankan fungsi koordinatif secara efektif.

Selain koordinasi horizontal dengan konfederasi regional, struktur birokrasi FIFA juga memungkinkan distribusi keputusan secara vertikal kepada asosiasi sepak bola nasional. Mekanisme ini memastikan bahwa kebijakan yang ditetapkan dapat segera dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh anggota organisasi tanpa memerlukan proses administratif yang panjang. Kecepatan penyampaian keputusan ini menjadi indikator bahwa struktur birokrasi FIFA cukup responsif dalam menghadapi situasi krisis internasional.

Namun demikian, implementasi kebijakan terhadap Rusia juga memperlihatkan adanya keterbatasan dalam struktur birokrasi organisasi, terutama pada aspek transparansi pengambilan keputusan. Proses internal yang cenderung tertutup menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keputusan organisasi sepenuhnya lahir dari mekanisme kelembagaan independen atau dipengaruhi oleh tekanan eksternal dari federasi anggota, sponsor, dan opini publik internasional. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa meskipun struktur birokrasi FIFA

efektif dalam aspek koordinasi dan pelaksanaan, masih terdapat tantangan dalam menjaga akuntabilitas proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan analisis indikator ini, struktur birokrasi FIFA dalam implementasi kebijakan terhadap Rusia dapat dinilai cukup efektif. Mekanisme koordinasi yang terorganisasi memungkinkan organisasi merespons konflik secara cepat dan memastikan kebijakan diterapkan secara luas di lingkungan sepak bola internasional. Temuan ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan organisasi internasional, struktur birokrasi yang terkoordinasi menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas kebijakan, terutama ketika organisasi dihadapkan pada situasi krisis yang menuntut respons cepat dan terstruktur.

## E. SIMPULAN

Implementasi kebijakan FIFA dalam menyikapi konflik Rusia Ukraina menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh George C. Edward III. Temuan penelitian menunjukkan bahwa FIFA pada awalnya menghadapi ambiguitas dalam penyampaian kebijakan, namun kemudian mampu mengambil keputusan yang lebih tegas melalui suspensi terhadap Rusia dengan dukungan kewenangan formal organisasi, sikap yang adaptif terhadap tekanan internasional, serta koordinasi birokrasi yang efektif dengan UEFA dan asosiasi anggota. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur dan berfokus pada implementasi kebijakan FIFA tanpa melibatkan perspektif langsung dari aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data empiris yang lebih luas, seperti wawancara dengan pemangku kepentingan olahraga internasional, serta mengkaji dampak jangka panjang kebijakan FIFA terhadap legitimasi organisasi dan tata kelola sepak bola internasional.

## REFERENCES

- Cahyono, Yoyok, 'Koordinasi Antar Lembaga Dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif', *Journal Of Law, Policy, And Governance*, 1 (2026), 14–19
- Hanifati, Afifa, 'Sanksi Olahraga Fifa Sebagai Upaya Peacebuilding Antara Rusia Dan Ukraina 2022' (Universitas Islam Indonesia, 2023)
- Mutohir, P. T. (2022). *Laporan Nasional Sport Development Index* . Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Kementerian Pemuda Dan Olahraga.
- Nugroho, R. (2022). *Foreign Policy*. Elex Media Komputindo.
- Suwintri, S. (2017). *Analisi Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro (Semarang).
- Taufiqurokhan, D. (2023). *Teori Dan Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Muhammadiyah .
- Turyandi, Itto, Octaviani R Santoso, Nining Latianingsih, Enung Nurchotimah, Jiwa Riwayanti, Yunita Fourina, And Others, *KEBIJAKAN PUBLIK (Proses, Tantangan, Dan Dinamika Global)* (Penerbit Widina, 2026)

- Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum, Haikal Ali, And M Nawawi, 'Capacity Building Kelembagaan Pemuda Dan Olahraga Dalam Sinergi Dan Optimalisasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat', 2019
- Daud, A., Dalam Intan, N. (2023). *Metodologi Penelitian Sosial Dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Kencana.
- Fédération Internationale De Football Association. (2009). *FIFA Statutes*. [FIFA Official Website](#)
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Nugroho, Riant, *Foreign Policy* (Elex Media Komputindo, 2022)
- Radhiansyah, Emil Radhiansyah, Danar Jovian, And Salsabilla Zafira Leonita, 'Analisis Kewenangan FIFA Atas Pencabutan Status Indonesia Sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023', *Journal Of Political Issues*, 5 (2023), 16–34
- Pandjaitan, Hinca Ikara Putra, *Kedaulatan Negara Versus Kedaulatan FIFA Dalam Kompetisi Sepakbola Profesional Untuk Memajukan Kesejahteraan Umum* (Gramedia Pustaka Utama, 2011)
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ullah, M., & Septiadi, R. (2023). Analisis Model Interaktif Dalam Penelitian Kebijakan Publik. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 8(2), 115-127.
- Wibowo, Wisnu Wirayudha, 'Fungsi Union Of European Football Association (UEFA) Dalam Mengatasi Rasisme Di Sepak Bola Italia Tahun 2014-2018' (Universitas Islam Indonesia, 2025)
- Zizi, Fransisco, 'Peran International Olympic Committee (Ioc) Dalam Penerapan Prinsip Netral Politik Piagam Olimpiade Pada Olimpiade Tokyo 2020', 2025